

Analisis Akuntabilitas Pembelanjaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Dalam Meningkatkan Sistem Pengadaan Sekolah (SIPLah) Di Sekolah Dasar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

Widianto Pribadi*

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

widianto.p@gmail.com

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Article history :

Received : Juli 4, 2025

Revised : Juli 29, 2025

Accepted : Agustus 7, 2025

Keywords :

Accountability;

Procurement System;



Copyright (c) 2026

Jurnal Reformasi Administrasi:

Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan

Masyarakat Madani

ABSTRACT

Accountability in School Operational Assistance (BOS) fund management is a crucial aspect for achieving transparent and efficient educational governance. The government has developed the School Procurement Information System (SIPLah) as a digital platform to facilitate the online expenditure of BOS funds. This research aims to analyze how accountability in Regular BOS fund expenditures can enhance the utilization of SIPLah in Elementary Schools in Jatiasih District, Bekasi City. The study also identifies encountered obstacles and formulates strategic solutions to support the effective digital financial management of schools. This study employs a qualitative descriptive approach. The findings indicate that accountability practices in BOS fund expenditures have functioned quite well in the studied schools, positively contributing to the increased use of SIPLah. Overall, accountability in Regular BOS fund expenditures proves to play a central role in driving SIPLah optimization towards more modern and adaptive school financial governance. As strategic recommendations, this study emphasizes the urgency of enhancing HR capacity through needs-based training, strengthening Information Technology infrastructure, and developing more responsive and collaborative control mechanisms involving various stakeholders.

PENDAHULUAN

Program BOS Reguler berfungsi sebagai pendukung utama bagi kegiatan operasional di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta akses bagi siswa di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan dana sekitar 52,5 triliun rupiah untuk program ini, yang bermanfaat bagi lebih dari 216.662 satuan pendidikan, termasuk SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB. Melalui kebijakan ini, diharapkan setiap institusi pendidikan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada siswa dan meningkatkan standar pendidikan secara keseluruhan.

Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi mengalami pertumbuhan populasi yang pesat, yang berdampak pada meningkatnya jumlah siswa di tingkat sekolah dasar. Saat ini, terdapat 60 sekolah dasar di kecamatan tersebut dengan total lebih dari 20.000 siswa. Untuk mendukung operasional sekolah, pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dengan realisasi pembelanjaan tahunan mencapai sekitar 13 miliar rupiah. Dalam pengelolaan dana BOS, sistem informasi yang efektif memiliki peran krusial dalam meningkatkan akuntabilitas, terutama dalam aspek transparansi dan akurasi pelaporan keuangan. Penggunaan sistem informasi yang baik memungkinkan sekolah untuk mengumpulkan data yang lebih akurat, menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, serta menyajikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dana BOS. Dengan demikian, implementasi sistem yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan sekolah serta mendukung optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) sebagai sarana pembelanjaan dana BOS secara lebih akuntabel dan efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pembelanjaan BOS Reguler dalam meningkatkan SIPLah di Sekolah Dasar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Serta dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada, seperti masalah kompetensi dan infrastruktur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan SIPLah, serta memberikan

masukannya bagi pengambil kebijakan di tingkat pemerintah daerah maupun pusat dalam rangka memperbaiki pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah dasar. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana pendidikan dan mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat, terutama siswa dan guru. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang akuntabilitas pembelanjaan dana BOS dalam meningkatkan SIPLah, diharapkan dapat tercipta sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan pengelolaan dana pendidikan dan mendukung pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Adapun dalam pendekatan kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan, menyajikan secara detail atas masalah yang ada dan kemudian menganalisis data untuk memberikan gambaran cukup atas suatu objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (Rony, 2017:32), “Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.”

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu, Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada, baik alam maupun buatan manusia, yang dapat mencakup fungsi, ciri, perubahan, hubungan, persamaan dan perbedaan antar fenomena. (Sukmadinata, 2017:72). Menurut Sugiyono (2017:31), operasional adalah adalah penentu struktur atau karakteristik yang akan dipelajari untuk menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan metode khusus yang akan digunakan studi dan penggunaan struktur, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain mengulangi tindakan dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran yang lebih baik. Dalam pengelolaan dana BOS, transparansi berarti informasi mengenai penggunaan dana harus terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Ini mencakup publikasi laporan keuangan, rincian alokasi, dan penggunaan dana secara spesifik di setiap sekolah. Misalnya, sekolah dapat memajang papan informasi di area publik atau mengunggah laporan ke situs web sekolah, memastikan masyarakat dapat memantau dan memahami bagaimana dana tersebut digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Akuntabilitas Pembelanjaan BOS Reguler Dalam Meningkatkan SIPLah Di Sekolah Dasar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis verbatim, akuntabilitas pembelanjaan dana BOS Reguler di Sekolah Dasar Kecamatan Jatiasih terlihat melalui penerapan lima dimensi utama, yang secara bersama-sama mendukung peningkatan penggunaan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Pembahasan dari analisis ke lima aspek tersebut adalah sebagai berikut :

- Transparansi menjadi pondasi utama dalam akuntabilitas pembelanjaan BOS. Informan menyatakan bahwa informasi terkait penggunaan dana BOS secara terbuka dipublikasikan melalui laporan tertulis, papan pengumuman, serta forum rapat dengan komite sekolah dan masyarakat. Upaya ini tidak hanya memastikan keterbukaan tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga sekolah dalam memantau penggunaan anggaran. Transparansi ini memungkinkan seluruh pemangku kepentingan memahami peruntukan dana, sehingga meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan mereka dalam proses SIPLah.
- Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Hasrullah, Dara Nianty, Yuli Permatasari (2023) tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamacinna. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa pengelolaan dana BOS sudah baik dengan akuntabilitas maksimal, namun publikasi informasi pengelolaan dana BOS belum sepenuhnya efektif kepada masyarakat luas dan lebih dominan transparansi internal. Hal ini menguatkan temuan penelitian ini bahwa meskipun ada upaya, akses informasi bagi

masyarakat umum masih terbatas pada forum internal dan media fisik. Senada dengan itu, studi Melissa Nathania Simanjuntak, Dewi Amaliah Nafiati, Neni Hendaryati (2024) juga menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan akuntabilitas, adanya kontrol dari berbagai pihak membantu meningkatkan pengawasan terhadap dana BOS.

- c. Hasil wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara menunjukkan kecenderungan bahwa laporan pertanggungjawaban disusun rutin dan diaudit, tetapi masih berorientasi kepada laporan formal ke Dinas Pendidikan. Aspek pertanggungjawaban ini sejalan dengan temuan dalam penelitian Aisyah Fithri Musfirah, Nurlaila, Yenni Samri Juliati Nasution (2024) yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi di sekolah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS. Sistem ini membantu mempercepat pelaporan keuangan dan administrasi. Hal ini mendukung peran SIPLah dalam membantu proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang efektif.
- d. Hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah menunjukkan bahwa meskipun ada aturan tertulis tentang sanksi, penerapan sanksi bersifat persuasif dengan tujuan lebih menyadarkan pelanggar dan mendorong mereka untuk mematuhi aturan. Pengawasan dari Dinas Pendidikan yang dilakukan secara berkala melalui sistem dan bukti pembelanjaan menunjukkan adanya mekanisme kontrol yang kuat. Peran Dinas Pendidikan yang tidak hanya mengawasi tetapi juga membina dan memberi arahan saat ada kekeliruan, melengkapi perspektif penegakan aturan dalam konteks akuntabilitas dana pendidikan. Studi Melissa Nathania Simanjuntak, Dewi Amaliah Nafiati, Neni Hendaryati (2024) juga menegaskan bahwa adanya kontrol dari berbagai pihak membantu meningkatkan pengawasan terhadap dana BOS, yang mengkonfirmasi pentingnya peran pengawasan eksternal.
- e. Secara spesifik, peran SIPLah dalam meningkatkan pengawasan dan efisiensi pembelanjaan dana BOS sangat ditekankan oleh informan, karena transaksi terekam otomatis dan transparan. Hal ini didukung kuat oleh penelitian Abd Basarul Mukmin, Elfrianto, Faisal Rahman Dongoran (2024) yang menyatakan bahwa SIPLah berperan besar dalam meningkatkan transparansi anggaran. Selain itu, Syantika Cahya Pamilia, Adji Suradji Muhammad, Okparizan (2022) juga menemukan bahwa implementasi SIPLah di sekolah dasar mempermudah proses pengadaan barang dan jasa, meningkatkan transparansi, dan mengurangi potensi korupsi. Dini Anggraeni, Anna Fariyanti, Eko Ruddy Cahyadi (2023) dalam studinya bahkan menyimpulkan bahwa penerapan SIPLah berkontribusi pada Good Government Governance dengan mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas serta mengurangi praktik korupsi. Seluruh temuan ini mengkonfirmasi bahwa SIPLah merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan peningkatan akuntabilitas.
- f. Hasil wawancara kepada kepala sekolah, bendahara, dan operator serta dokumentasi laporan pengaduan sekolah membuktikan bahwa respon terhadap keluhan cukup cepat melalui rapat komite dan kotak saran. Namun, belum ada mekanisme digital atau hotline khusus yang memungkinkan laporan diterima secara cepat di luar jam sekolah. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperluas kanal umpan balik berbasis teknologi agar publik merasa lebih dekat dan dihargai.

2. Hambatan Dalam Akuntabilitas Pembelanjaan BOS Reguler Dalam Meningkatkan SIPLah Di Sekolah Dasar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

Meskipun terdapat upaya akuntabilitas yang baik, beberapa faktor menjadi tantangan dan penghambat dalam menganalisis dan mengoptimalkan akuntabilitas tersebut untuk peningkatan SIPLah:

a. Keterbatasan Pemahaman dan Kapasitas SDM

Beberapa informan menunjukkan kurangnya pemahaman menyeluruh tentang aturan dan mekanisme pengelolaan dana BOS dan SIPLah, terutama dalam input data digital. Hal ini menjadi kendala dalam penerapan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Kendala ini sesuai dengan temuan dalam penelitian Aisyah Fithri Musfirah, Nurlaila, Yenni Samri Juliati Nasution (2024) yang juga mencatat kelemahan dalam hal pelatihan sumber daya manusia dan penerimaan sistem di kalangan pihak terkait.

b. Publikasi Informasi yang Terbatas

Transparansi lebih banyak dilakukan dalam forum internal rapat komite, orang tua murid dan papan pengumuman di sekolah, sehingga akses informasi bagi masyarakat umum masih terbatas. Kurangnya publikasi melalui media digital atau kanal lain dapat membatasi pemantauan publik.

Keterbatasan ini juga disoroti oleh penelitian Hasrullah, Dara Nianty, Yuli Permatasari (2023) yang menunjukkan bahwa informasi pengelolaan dana BOS belum dipublikasikan secara efektif kepada masyarakat.

c. Sanksi yang Kurang Tegas dan Konsekuen

Meski ada mekanisme sanksi administratif, penerapan sanksi cenderung bersifat ringan dan belum memberikan efek jera yang kuat. Hal ini berpotensi melemahkan kedisiplinan dalam pengelolaan dana.

d. Pengawasan yang Terbatas oleh Pihak Eksternal

Pengawasan utama masih dilakukan oleh internal sekolah dan dinas, tetapi keterlibatan masyarakat dan lembaga independen dalam pengawasan kurang optimal, sehingga risiko penyimpangan dapat tetap ada.

e. Tantangan Teknis dalam Integrasi SIPLah

Penggunaan SIPLah sebagai sistem digital masih terkendala pada kemampuan teknis dan ketersediaan sarana/prasarana Teknologi Informasi di beberapa sekolah, menyebabkan data yang diinput belum sepenuhnya akurat atau lengkap. Hambatan ini diperkuat oleh temuan dalam studi Abd Basarul Mukmin, Elfrianto, Faisal Rahman Dongoran (2024) yang mencatat tantangan seperti harga barang yang tinggi, terbatasnya jumlah toko di SIPLah, dan waktu pengiriman yang lama. Demikian pula, penelitian Syantika Cahya Pamilia, Adji Suradji Muhammad, Okparizan (2022) juga mengidentifikasi tantangan pengiriman barang dan keterbatasan pilihan toko penyedia.

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Akuntabilitas Pembelanjaan BOS Reguler Dalam Meningkatkan SIPLah Di Sekolah Dasar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

Upaya merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi berikut dapat diimplementasikan:

a. Pelatihan dan Penguatan Kapasitas SDM

Mengadakan pelatihan rutin untuk kepala sekolah, bendahara, dan staf teknis mengenai pengelolaan dana BOS, akuntabilitas, dan penggunaan SIPLah agar pemahaman dan kemampuan teknis meningkat.

b. Perluasan Media Publikasi Transparansi

Memanfaatkan teknologi informasi seperti website sekolah, media sosial, dan aplikasi khusus agar informasi pembelanjaan dana BOS dapat diakses lebih luas oleh masyarakat.

c. Penegakan Sanksi yang Lebih Tegas dan Sistematis

Menerapkan sanksi administratif yang tegas, konsisten, dan transparan untuk pelanggaran penggunaan dana BOS guna meningkatkan kedisiplinan dan akuntabilitas yang akan memperkuat dimensi penegakan aturan.

d. Peningkatan Pengawasan Eksternal dan Partisipasi Publik

Melibatkan lembaga masyarakat, komite sekolah yang lebih aktif, dan pihak independen dalam pengawasan dan audit untuk menambah lapisan kontrol yang efektif.

e. Mekanisme Responsif dan Umpan Balik Berkelanjutan

Memperkuat mekanisme penampungan dan penanganan masukan dari masyarakat dan orang tua dengan sistem monitoring yang responsif sehingga perbaikan dapat dilakukan tepat waktu. Dan ini akan meningkatkan dimensi responsivitas dan memastikan perbaikan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akuntabilitas pembelanjaan BOS Reguler dalam meningkatkan penggunaan SIPLah di Sekolah Dasar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Akuntabilitas pembelanjaan BOS Reguler di sekolah dasar di Kecamatan Jatiasih telah berjalan dengan baik, yang tercermin dari penerapan lima dimensi akuntabilitas yaitu transparansi, pertanggungjawaban, penegakan aturan, pengendalian, dan responsivitas. Kelima dimensi ini secara bersama-sama mendukung peningkatan penggunaan SIPLah dalam proses pengadaan barang dan jasa di sekolah.
2. Tantangan utama dalam menganalisis dan mengoptimalkan akuntabilitas pembelanjaan BOS Reguler untuk mendukung SIPLah meliputi keterbatasan pemahaman dan kapasitas SDM, keterbatasan akses publik terhadap informasi, penegakan sanksi yang belum maksimal, pengawasan eksternal yang terbatas, serta kendala teknis dalam penggunaan SIPLah.
3. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan, perluasan media publikasi transparansi, penegakan sanksi yang lebih tegas, peningkatan pengawasan eksternal, pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi, serta penguatan mekanisme responsif terhadap masukan dari masyarakat dan orang tua murid.

DAFTAR PUSTAKA

- Behn, Robert D. (2001). *Rethinking Democratic Accountability*, Washington : Brookings Institution Press.
- Bovens, M., Schillemans, T., & Goodin, R. E. (2014). *Public Accountability: Designs, Dilemmas, and Experiences*. Oxford : Oxford University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- International Public Management Journal, December 1998, Behn, Robert, dengan Judul "The new public management paradigm and the search accountability"
- Journal of Education Research, 5(4), 2024, Pages 6191-6197, Melissa Nathania Simanjuntak, Dewi Amaliah Nafiati, Neni Hendaryati, dengan judul "Menuju Pendidikan Berintegritas: Studi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS"
- Jurnal EduTech Vol. 10 No. 1 Maret 2024, Abd Basarul Mukmin, Elfrianto, Faisal Rahman Dongoran, dengan judul "Analisis Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLAH) Dalam Transparansi Anggaran Di SMAN 2 Gunung Meriah Aceh Singkil"
- Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 7 No 2, Juli 2024, Aisyah Fithri Musfirah, Nurlaila, Yenni Samri Juliati Nasution, dengan judul "Akuntabilitas Dan Transparansi Dana BOS: Transformasi Melalui Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Di UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi"
- Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 20, Nomor 1, April 2022: 1-13, Syantika Cahya Pamilia, Adji Suradji Muhammad, Okparizan, dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui SIPLAH di SD Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang"

Jurnal Manuver - Volume 1 No. 1, Maret 2023, Hasrullah, Dara Ayu Nianty, Yuli Permatasari, dengan judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana BOS Pada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamacinna”

Mantja. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta.

Moleong, Lexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Riyadi. (2005). Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

SARR – Vol. 1 No. 5. Tahun 2022, Darmawan, Hendro Wardhono, dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembelanjaan Dana BOS Melalui Aplikasi SIPLAH Dalam Perspektif Smart Governance”

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : CV Alfabeta.

Yusuf, Muri. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Salemba Empat.